



SEJARAH PUSAT HIDRO-OSEANOGRAFI TNI ANGKATAN LAUT

Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut atau Pushidrosal bertugas menyelenggarakan operasi survei pemetaan Hidro-Oceanografi militer maupun nasional yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran serta menyiapkan data dan informasi di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional dalam rangka mendukung kepentingan TNI maupun publik untuk pertahanan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Pushidrosal berkewajiban menyiapkan, menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan keselamatan navigasi pelayaran, Pushidrosal mempunyai kewenangan dan legalitas tunggal dalam bidang hidrografi dalam menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi berupa peta laut, baik peta kertas maupun peta navigasi elektronik dan publikasi nautika.

Pushidrosal ditetapkan sebagai lembaga hidrografi nasional dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1951 tanggal 31 Maret 1951 (PP RI No. 23/1951) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 tahun 1960 tanggal 14 Juli 1960 (Keppres RI No. 164/1960), mengemban fungsi sebagai Lembaga Hidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia.

Sebagai pengemban fungsi hidrografi militer dan pertahanan, Pushidrosal bertanggung jawab untuk mampu menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi yang akurat dan mutakhir sebagai data dasar yang akan digunakan sebagai bahan analisa strategi pertahanan nasional.

Sedangkan sebagai Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia, Pushidrosal melaksanakan fungsinya sebagai penanggung jawab untuk memberikan jaminan keselamatan navigasi pelayaran di seluruh wilayah perairan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah berdirinya Pushidrosal diawali dengan dibentuknya panitia perbaikan pemetaan laut di Netherland East Indies pada tahun 1821. Kemudian pada 1823 Angkatan Laut Belanda mendirikan depo peta laut di Batavia yang berfungsi menyediakan peta laut dan buku nautika untuk kepentingan umum. Seiring dengan perkembangan lalu lintas perdagangan saat itu, pada tahun 1848 Depo Peta Laut dikembangkan menjadi Bureau

Hidrografie. Selanjutnya pada tahun 1850, dibentuk Geografische Dients (Dinas Geografi) di bawah Angkatan Laut Belanda.

Pada tahun 1864 lembaga tersebut dilikuidasi menjadi bagian dari Departemen Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Batavia. Kemudian pada tanggal 9 Juli 1874, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk dan meresmikan Bureau Hidrografie yang merupakan bagian dari Departemen der Marine Kerajaan Belanda untuk mengantisipasi semakin ramainya lalu lintas kapal dagang antara Eropa ke Indonesia, serta semakin meningkatnya kebutuhan akan data hidrografi. Pada tahun 1876 melalui Surat Keputusan Parlemen Belanda, kantor Hidrografi di Batavia dibuka kembali sebagai the East Branch, akan tetapi pembuatan peta laut tetap menjadi tugas kantor hidrografi di Den Haag. Dalam periode tahun 1885 hingga 1889, kantor Hidrografi Batavia kembali digabung dengan Kantor Hidrografi di Den Haag hingga masa perang dunia I dan II.

Disamping kegiatan survei dan pemetaan hidrografi, Biro Hidrografi ikut serta dalam penelitian laut seperti Ekspedisi Challenger tahun 1854-1857 yang meliputi survei hidrografi dan oseanografi. Ekspedisi Siboga pada tahun 1899 merupakan ekspedisi yang dianggap sebagai peletak dasar bagi pengetahuan tentang cekungan-cekungan dalam perairan Indonesia Timur dan menghasilkan penamaan laut-laut di Indonesia. Terjadinya Perang Dunia I pada tahun 1914 menyebabkan terjadi kekurangan personel pada kapal-kapal survei dan pemetaan Angkatan Laut Belanda, sehingga pada waktu itu mulai ditugaskan perwira dari Gouvernement Marine (Jawatan Pelayaran). Pada tahun 1918, Gouvernement Marine membentuk organisasi pemetaan laut sendiri yang dapat membantu Angkatan Laut Belanda melaksanakan survei dan pemetaan dengan menggunakan kapalnya sendiri. Pada periode ini dilaksanakan Ekspedisi Snellius I pada tahun 1929-1930 yang merupakan ekspedisi paling terkenal dan dianggap sebagai suatu kemajuan dalam penelitian oseanografi fisika dan Ekspedisi Dana yang dilakukan pada tahun 1932 yang merupakan kelanjutan dari Ekspedisi Snellius I.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) kegiatan survei dan pemetaan laut di Indonesia tidak banyak dilakukan karena kesibukan Jepang dalam perang. Penelitian yang dilakukan hanya untuk kepentingan perang dan pertahanan militer Jepang di Indonesia. Penelitian laut yang dilaksanakan diantaranya di perairan Teluk Bone dan Kolaka di Sulawesi Selatan untuk kepentingan tambang nikel, di perairan Teluk kau (Halmahera), halong-Ambon, Selat Bangka dan Palembang yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut Jepang.

Pada periode awal kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1950) kedua organisasi hidrografi pada masa penjajahan Belanda keberadaannya tetap dipertahankan. Kegiatan surta laut di Indonesia dilaksanakan oleh Biro Hidrografi Belanda. Pada tanggal 18

Oktober 1951, Pushidrosal atas nama pemerintah Indonesia tercatat sebagai anggota International Hydrographic Organization (IHO) ke-64 yang berkedudukan di Monaco.

Pada tahun 1951 dibentuk dua pejabatan hidrografi yaitu bagian hidrografi yang merupakan bagian dari Jawatan Pelayaran Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan pembuatan dan perbaikan peta laut, pedoman-pedoman laut, buku-buku dan penerbitan hidrografi lain sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1951 tanggal 31 Maret 1951 tentang pejabatan-pejabatan hidrografi pelayaran sipil. Pada tahun 1954-1957 dilakukan penelitian-penelitian laut secara rutin dan penelitian oseanografi. Kekuatan armada hidrografi saat itu terdiri unsur-unsur; KM Burjamhal, KM Dewa Kembar, KM Parit I dan KM Parit-II.

Berdasarkan pertimbangan strategis dan efisiensi, Pemerintah pada tanggal 14 Juli 1960 mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 tahun 1960 tentang penggabungan pejabatan Hidrografi Jawatan Pelayaran Departemen Perhubungan Laut ke dalam Jawatan Hidrografi Angkatan Laut (Janhidral) untuk melaksanakan fungsi hidro-oseanografi di seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya guna memenuhi sumber daya manusia, pada tanggal 1 April 1963 didirikan Sekolah Hidrografi dengan program pendidikan selama tiga tahun. Disamping itu, juga diadakan pengiriman personel untuk belajar di ITB, dan di luar negeri seperti; Amerika Serikat, Yugoslavia, Australia, Jepang dan Rusia.

Pada tahun 1962 terjadi perubahan struktural organisasi dari Jawatan ke Direktorat, sehingga Janhidral berubah menjadi Direktorat Hidrografi Angkatan Laut (Dithidral), yang juga diikuti dengan penambahan kapal-kapal survei yaitu RI Aries dari Rusia, RI Mayang tahun 1962 dan RI Jalanidhi dari Jepang tahun 1963. Sesuai dengan perkembangan organisasi TNI AL secara menyeluruh dan perkembangan iptek kelautan khususnya, pada tanggal 23 Juli 1971 berdasarkan Skep Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan bersenjata (Skep Menhankam/Pangab) Nomor : Kep/A/39/VII/1971 Dithidral diubah menjadi Dinas Hidrografi TNI Angkatan Laut (Dishidral).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/11/VI/1976 tanggal 5 April 1976 Dishidral diubah namanya menjadi Jawatan Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut (Janhidros). Berdasarkan Keputusan Pangab RI Nomor : Kep/09/P/III/84 tanggal 31 Maret 1984 Janhidros diubah menjadi Dinas Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Dishidros). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor: 7/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang perubahan kembali Dishidros menjadi Jawatan Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Janhidros) dan kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor:

Perkasal/42/VIII/2008 tanggal 2 Juli 2008 Janhidros diubah kembali namanya menjadi Dishidros.

Guna memenuhi tuntutan tugas dan seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menjadikan sektor maritim sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, kontribusi sektor hidro-oseanografi yang dilaksanakan oleh Dishidros TNI AL dituntut untuk semakin ditingkatkan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2016 tentang perubahan Atas Perpres Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, dilaksanakan validasi organisasi Dishidros menjadi Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), yang pengukuhanannya dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) pada tanggal 13 September 2016 dengan upacara militer bertempat di Dishidros, Jalan Pantai Kuta V/1 Ancol Timur Jakarta Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/145/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, serta Surat Keputusan Kasal Nomor 613 dan 615/III/2021, dilaksanakan validasi Organisasi Pushidrosal. Pushidrosal yang sebelumnya dipimpin Kapushidrosal yang dijabat oleh Pati TNI AL bintang dua (Laksamana Muda) menjadi Komandan Pushidrosal yang dijabat oleh Pati berbintang tiga (Laksamana Madya TNI).

Sebagai pengembangan fungsi hidrografi militer dan pertahanan, Pushidrosal bertanggung jawab untuk mampu menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi yang akurat dan mutakhir sebagai data dasar yang akan digunakan sebagai bahan analisa strategi pertahanan nasional.

Sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, Pushidrosal mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan keselamatan Navigasi pelayaran di seluruh wilayah perairan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan produk-produk yang dihasilkan adalah Peta Laut Indonesia (PLI) untuk memenuhi kebutuhan navigasi laut dalam bentuk kertas atau Analog dan dalam bentuk elektronik atau ENC pada berbagai skala yang selalu diperbarui sesuai dengan mandat Konvensi (Safety of Life at Sea (SOLAS) International Maritime Organization (IMO). selain itu. Pushidrosal juga memproduksi buku-buku Publikasi Nautika seperti, Almanak nautika, Kepanduan Bahari, Daftar arus dan pasangsurut, Daftar suar Indonesia, Berita Pelaut Indonesia, informasi pelabuhan Indonesia, Daftar stasiun radio pantai dan beberapa produk lainnya sebagai asosiasi dari peta laut Indonesia untuk digunakan sebagai panduan dalam bernavigasi. Pushidrosal saat ini juga mengembangkan aplikasi Indonesia Hydrographic Data Center (IHDC) dalam rangka mendukung kebutuhan komunitas maritim.

Sebagai Lembaga Hidrografi, Pushidrosal merupakan representasi legal dan wakil pemerintah RI dalam keanggotaan resmi organisasi internasional, yaitu International Hydrographic Organization (IHO) yang berkedudukan di Monaco, East Asia Hydrographic Commission (EAHC), North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) serta South West Pacific Hydrographic Commission (SWPHC). Saat ini Indonesia dalam hal ini Danpushidrosal adalah Chair East Asia Hydrographic Commission (EAHC). Selain itu menjadi anggota delegasi pemerintah RI di beberapa organisasi internasional seperti International Maritime Organization (IMO), Inter-Government Oceanographic Commission (IOC), United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

Pushidrosal mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan maritim nasional dan sangat aktif berkolaborasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya dengan Kemenkomarves RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Kemenkominfo maupun dengan Lembaga-lembaga yang lain diantaranya BRIN, BIG, BMKG, serta Badan Geologi. Pushidrosal juga menjadi anggota dalam beberapa Timnas, diantaranya Timnas Landas Kontinen, Timnas Sedimentasi, Timnas Perundingan Batas maritim, Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI), Timnas Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), serta Timnas Pipa dan Kabel bawah laut. Berdasarkan Keputusan Menkomarves Nomor 51 tahun 2023, Danpushidrosal mendapatkan amanah untuk mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai ketua tim pelaksana tim nasional pengelolaan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut guna mengawal penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut. Hal ini Sebagai bagian dalam proses implementasi penataan ruang laut sesuai dengan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang alur pipa dan/atau kabel bawah laut.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Pushidrosal telah dipimpin sebanyak 25 perwira tinggi TNI AL. Laksamana Pertama TNI Drs. Wardiman tercatat sebagai pemimpin Pushidrosal pertama saat masih bernama Kajahidral yang menjabat dari tahun 1960 sampai dengan 1968. Sejak 20 November 2023 hingga Saat ini, Pushidrosal dipimpin oleh Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M. sebagai Komandan Pushidrosal (Danpushidrosal).